



# **PENJELASAN FUNGSI UPT BPOM FUNGSI MANAJEMEN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si  
Inspektorat Utama Badan POM**

**Hotel Shangri-La Jakarta, 28 Juni 2018**

# OUTLINE

**1**

**PEMBAGIAN KEWENANGAN  
DAN TUSI UPT**

**2**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
MANAJEMEN UPT BPOM**

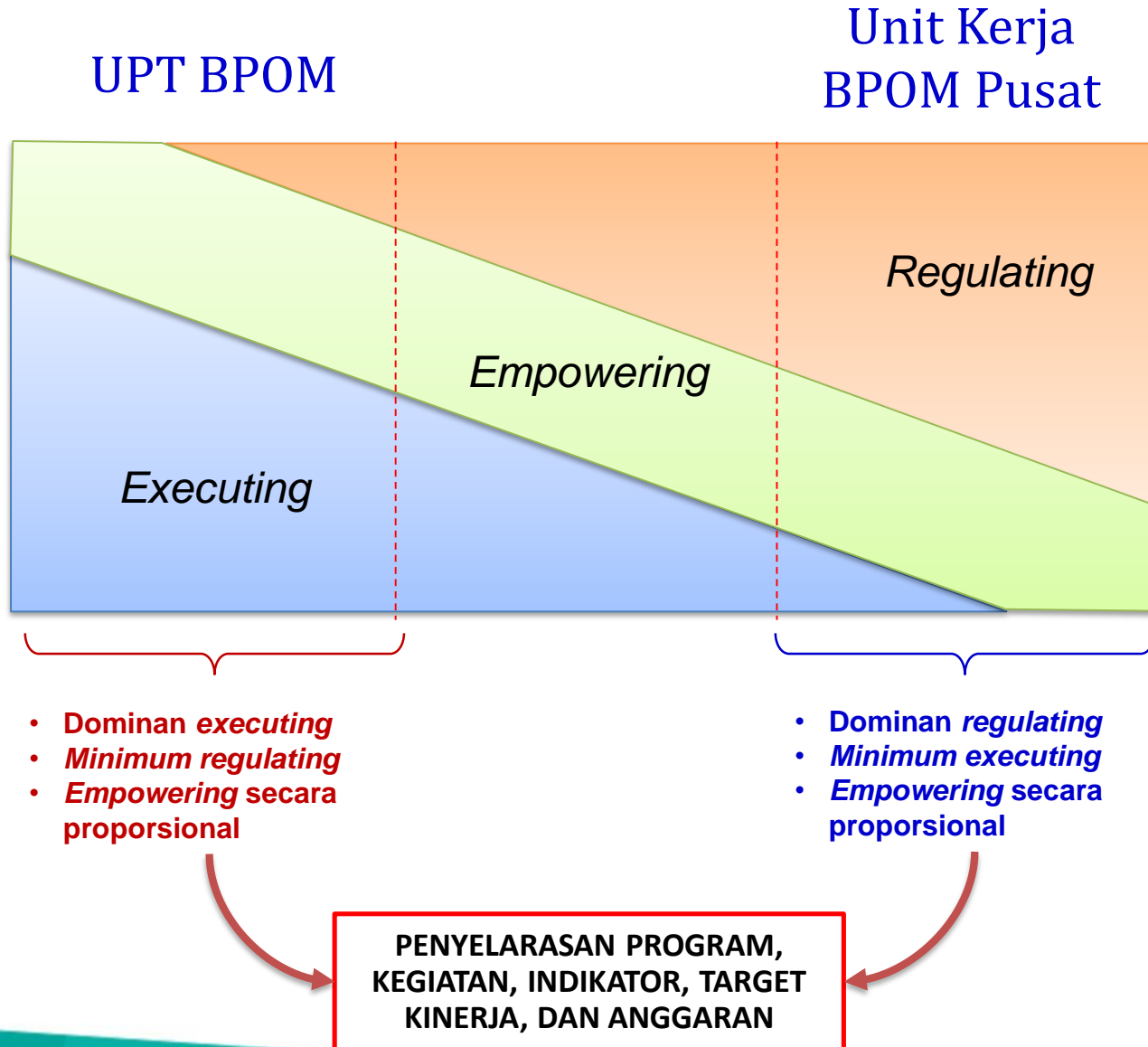
**3**

**UKURAN KINERJA FUNGSI  
MANAJEMEN UPT BPOM**

**1**

**PEMBAGIAN KEWENANGAN  
DAN TUSI UPT**

# PEMBAGIAN KEWENANGAN UPT DAN UNIT KERJA PUSAT



# FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Pengawasan/ Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan pengawasan/pemeriksaan OM</li> <li>2. Penyusunan NSPK pengawasan/pemeriksaan OM</li> <li>3. Pemberian bimtek/supervisi pengawasan/pemeriksaan OM</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan/pemeriksaan OM</li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/distribusi OM dan saryanfar</li> <li>2. Sertifikasi produk OM</li> <li>3. <i>Sampling</i> OM</li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/ distribusi OM dan saryanfar</li> <li>2. Sertifikasi produk OM</li> <li>3. <i>Sampling</i> OM</li> </ol>
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

*Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya*

# FUNGSI PENINDAKAN

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Penindakan	1. Penyusunan kebijakan <b>pengamanan</b> , penyidikan OM 2. Penyusunan NSPK <b>pengamanan</b> , penyidikan OM 3. Pemberian bimtek/supervisi <b>pengamanan</b> , penyidikan OM 4. Pelaksanaan kebijakan <b>pengamanan</b> OM 5. Pelaksanaan kebijakan intelijen dan penyidikan OM	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: 1. Intelijen OM 2. Penyidikan OM	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: 1. Intelijen OM 2. Penyidikan OM
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

*Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya*

# FUNGSI PENGUJIAN

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan pengujian kimia dan mikrobiologi OM, <b>biologi molekuler, baku pembanding</b></li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan pengujian kimia dan mikrobiologi OM, <b>biologi molekuler, baku pembanding</b></li> <li>3. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi OM <b>lingkup nasional</b></li> <li>4. Pelaksanaan pengujian <b>biologi molekuler, baku pembanding</b></li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian kimia OM</li> <li>2. Pengujian mikrobiologi OM</li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian OM
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

*Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya*

# FUNGSI KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, kerja sama OM</li> <li>2. Pengelolaan pengaduan masyarakat OM</li> <li>3. Pelaksanaan KIE OM</li> <li>4. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi kerja sama OM</li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan KIE dan pengaduan konsumen OM</li> <li>2. Penyiapan koordinasi kerja sama OM</li> </ol>	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan KIE dan pengaduan konsumen OM</li> <li>2. Penyiapan koordinasi kerja sama OM</li> </ol>
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

*Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya*

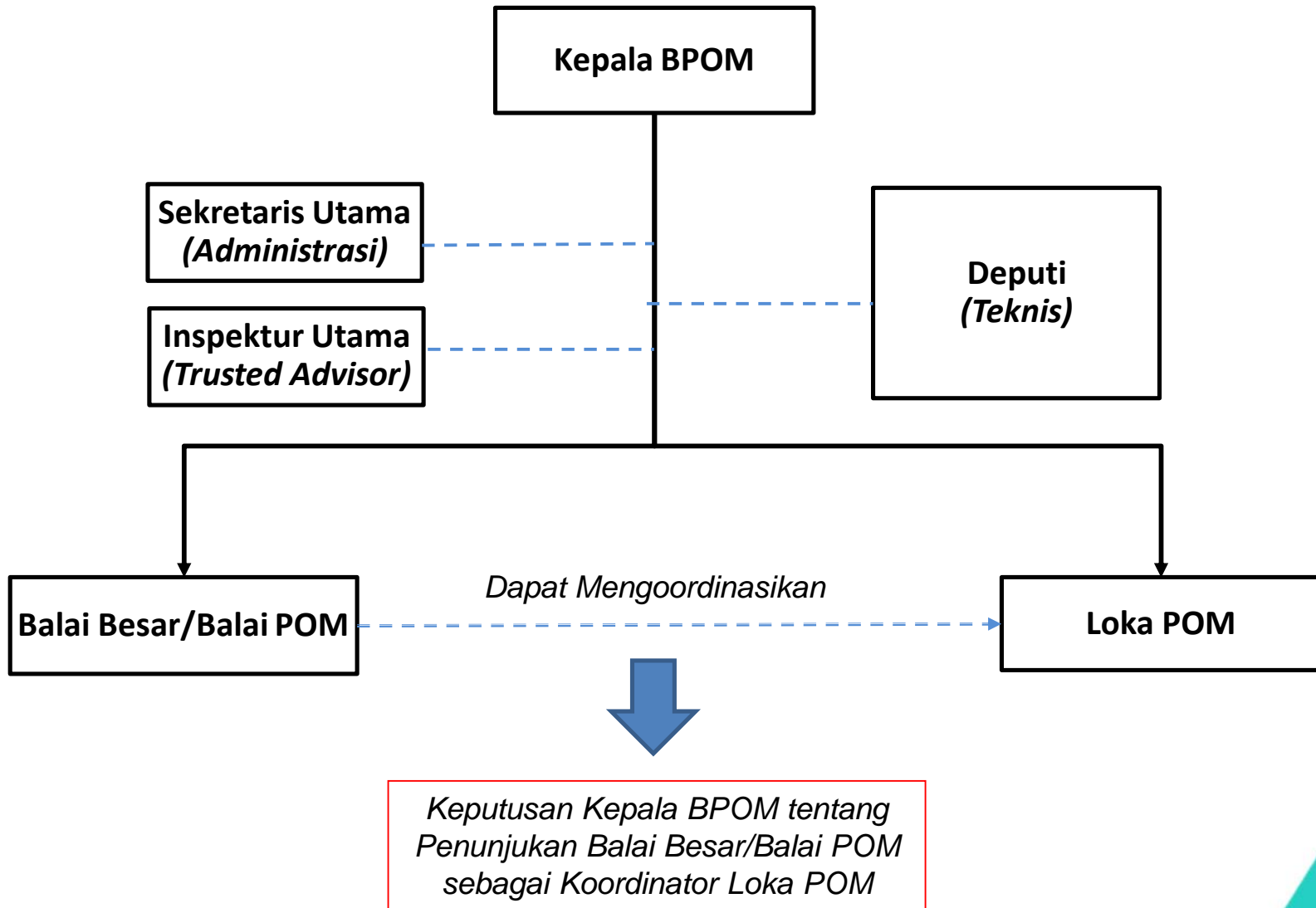


# FUNGSI MANAJEMEN

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Manajemen	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM	Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan	Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, meliputi koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

*Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya*

# POLA KOORDINASI UPT BPOM



**2**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
MANAJEMEN UPT BPOM**

# LATAR BELAKANG



**DOING BUSINESS IN INDONESIA** Peningkatan Indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) (dr peringkat 128 di 2013 ke 109 pada 2016)

**TANTANGAN PENGAWASAN OM DALAM NEGERI**  
**TANTANGAN PENGAWASAN OM LUAR NEGERI**

**Peningkatan Ekspor sektor non migas**

- Makanan olahan: **6,22 %**
- Produk farmasi: **3,64 %**

**Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Badan POM**

Tahun	Hasil	Pengkukit
2014	26.93	30.64
2015	30.25	40.64
2016	30.89	42.30
2017	31.16	45.20

# ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHUN 2014 SD 2019

## UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	1. Opini WTP Atas Laporan Keuangan			
	a. K/L	%	74	95
	b. Provinsi	%	53	85
	c. Kabupaten	%	18	60
	d. Kota	%	33	65
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1 - 5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1 - 5	1	3
	4. Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)			
	a. K/L	%	39,3	85
	b. Provinsi	%	27,3	75
c. Kabupaten/ Kota	%	30	50	
5. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	%	30	80	
<b>Birokrasi yang efektif dan efisien</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional			
	a. K/L	Skor 1 - 100	47	75
	b. Provinsi	Skor 1 - 100	NA	60
	c. Kabupaten/ Kota	Skor 1 - 100	NA	45
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1 - 100	76	86
	3. Indeks <i>e-Government</i> Nasional			
	a. K/L	Skor 0 - 4	2,66	
b. Provinsi	Skor 0 - 4	2,2	3,4	
c. Kabupaten/ Kota	Skor 0 - 4	2,2		
<b>Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas</b>	1. Indeks Integritas Nasional			
	a. Integritas pelayanan Publik (Pusat)	Skor 0 - 10	7,22	9
	b. Integritas pelayanan Publik (Daerah)	Skor 0 - 10	6,82	8,5
	2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95
	3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)			
	a. K/L	%	K: 64; L:15	100
b. Provinsi	%	50	100	
c. Kabupaten/ Kota	%	5	80	

# PERBAIKAN KINERJA BIROKRASI BADAN POM

## PERUBAHAN POLA PIKIR & BUDAYA KERJA

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi



## TATA LAKSANA PEMERINTAHAN

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*

## SDM APARATUR

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera



## PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat



## PERATURAN PER UU

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif



## AKUNTABILITAS KINERJA

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi



## PENGAWASAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

## ORGANISASI

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran



# Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2017 oleh Kementerian PAN dan RB

## 1. 6 Balai dengan kategori sangat baik (A-)

- BBPOM di Samarinda
- BBPOM di Surabaya
- BPOM di Bengkulu
- BBPOM di Yogyakarta
- BBPOM di Palembang
- BPOM di Serang

## 2. 19 Balai dengan kategori baik (B)

- BPOM di Palangkaraya
- BPOM di Batam
- BBPOM di Mataram
- BBPOM di Makasar
- BBPOM di Manado
- BBPOM di Banjarmasin
- BBPOM di Semarang
- BPOM di Kendari
- BBPOM di Bandar Lampung
- BBPOM di Denpasar
- BBPOM di Bandung
- BPOM di Gorontalo
- BBPOM di Pekanbaru
- BPOM di Pangkalpinang
- BPOM di Jambi
- BPOM di Kupang
- BPOM di Palu
- BPOM di Ambon
- BBPOM di Jayapura

## 3. 6 Balai dengan kategori Baik dengan catatan (B-)

- BBPOM di Banda Aceh
- BBPOM di Medan
- BBPOM di Jakarta
- BBPOM di Pontianak
- BBPOM di Padang
- BPOM di Manokwari

## 4. 1 Balai dengan Kategori Cukup (C)

- BPOM di Mamuju

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik  
Badan POM 2017 oleh  
Kementerian PAN dan RB dengan  
Nilai Rata-rata 3,72 dari skala 5

## PENJABARAN KEGIATAN UTAMA BPOM TA. 2019

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

NO	AKTIVITAS UTAMA	TARGET 2018	TARGET 2019	ALOKASI 2018	ALOKASI 2019
1	Penyelesaian Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	318 perkara	371 perkara	27.082.671.000	32.702.325.000
2	Penyelesaian Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan	80 dokumen	33 layanan	7.101.039.000	7.349.575.000
3	Pemeriksaan sampel makanan sesuai standar	24.952 sampel	24.952 sampel	17.941.047.000	18.522.205.000
4	Pemeriksaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	59.153 sampel	59.442 sampel	31.288.573.000	32.430.451.000
5	Pelaksanaan layanan dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium	211 dokumen	33 layanan	75.068.363.000	84.145.756.000
6	Pengawasan sarana produksi obat dan makanan	4.657 sarana	5.784 sarana	6.500.000.000	7.712.828.000
7	Pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan	20.876 sarana	36.082 sarana	33.217.384.000	56.738.915.000
8	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	14.000 sarana		21.708.000.000	



## PENJABARAN KEGIATAN UTAMA BPOM TA. 2019

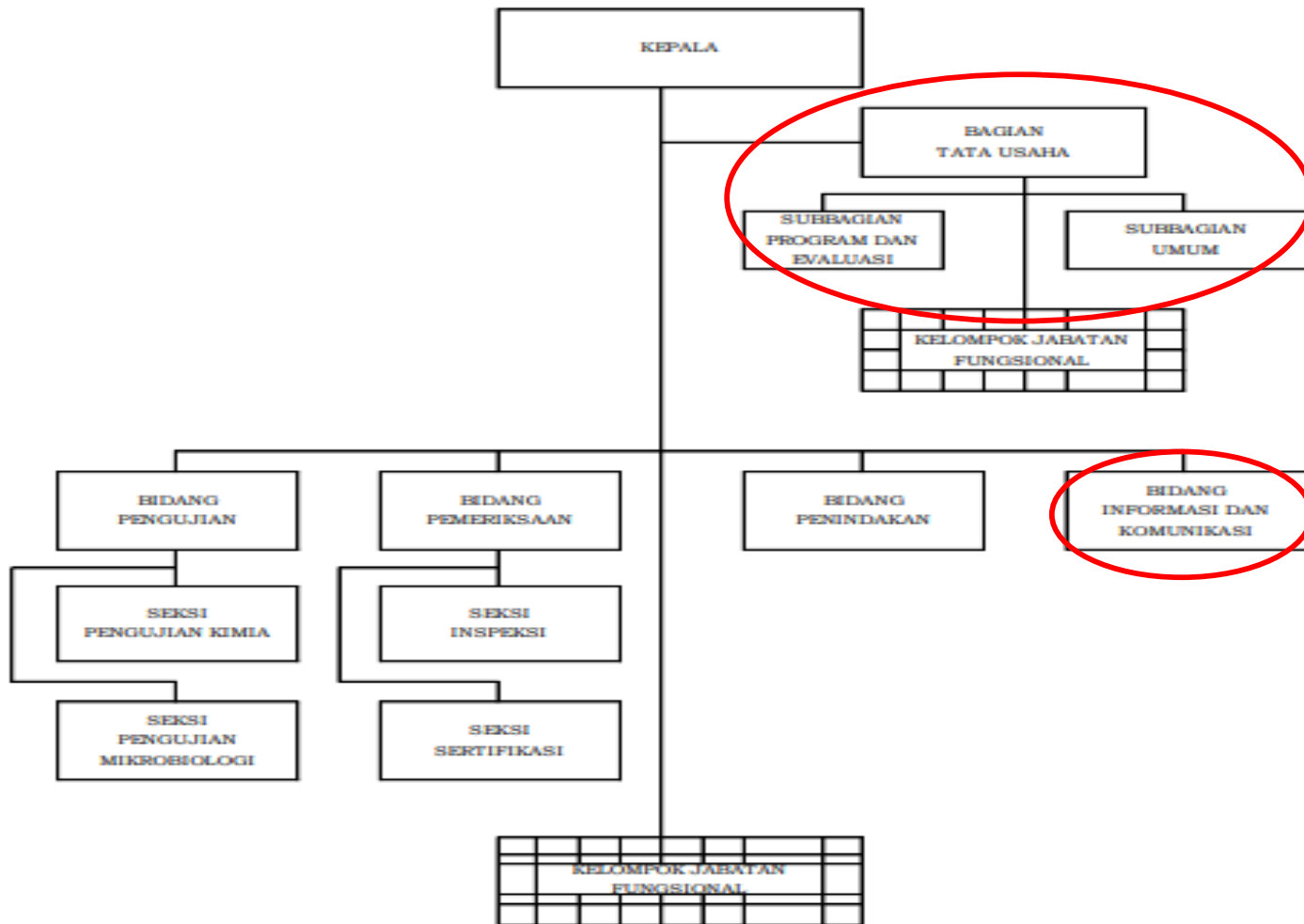
### Program Pengawasan Obat dan Makanan

### Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

NO	AKTIVITAS UTAMA	TARGET 2018	TARGET 2019	ALOKASI 2018	ALOKASI 2019
9	Tindak lanjut keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	3500 Keputusan	2994 Keputusan	39.000.000.000	36.000.000.000
10	Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5000 sekolah	7000 sekolah	16.500.000.000	23.908.500.000
11	Penyelesaian keputusan penilaian sertifikasi	19548 Keputusan	19548 Keputusan	22.998.700.000	23.000.000.000
12	Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan aman	1190 KIE	1190 KIE	70.000.000.000	75.000.000.000
13	Intervensi terhadap Desa Pangan Aman	-	2200 desa	-	28.217.658.000
14	Intervensi terhadap Pasar aman dari bahan berbahaya	-	33 pasar	-	9.880.191.000
15	Sarana prasana sesuai standar	33 paket	1 Layanan	10.161.759.000	107.838.870.000
16	Bangunan/gedung	13776 m2		81.539.821.000	
17	Layanan internal (overhead)	1 layanan		11.711.339.000	
18	Penyediaan alat laboratorium	911 unit	547 unit	230.999.954.000	231.000.000.000
19	Pelaporan tepat waktu dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	297 dokumen	330 dokumen	49.784.183.000	51.526.630.000
20	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	40 kabupaten /kota	20 kabupaten /kota	150.400.000.000	75.200.000.000
21	Layanan perkantoran	33 layanan	33 layanan	399.236.473.000	444.341.248.000
<b>Total</b>				<b>1.302.239.306.000</b>	<b>1.345.515.152.000</b>

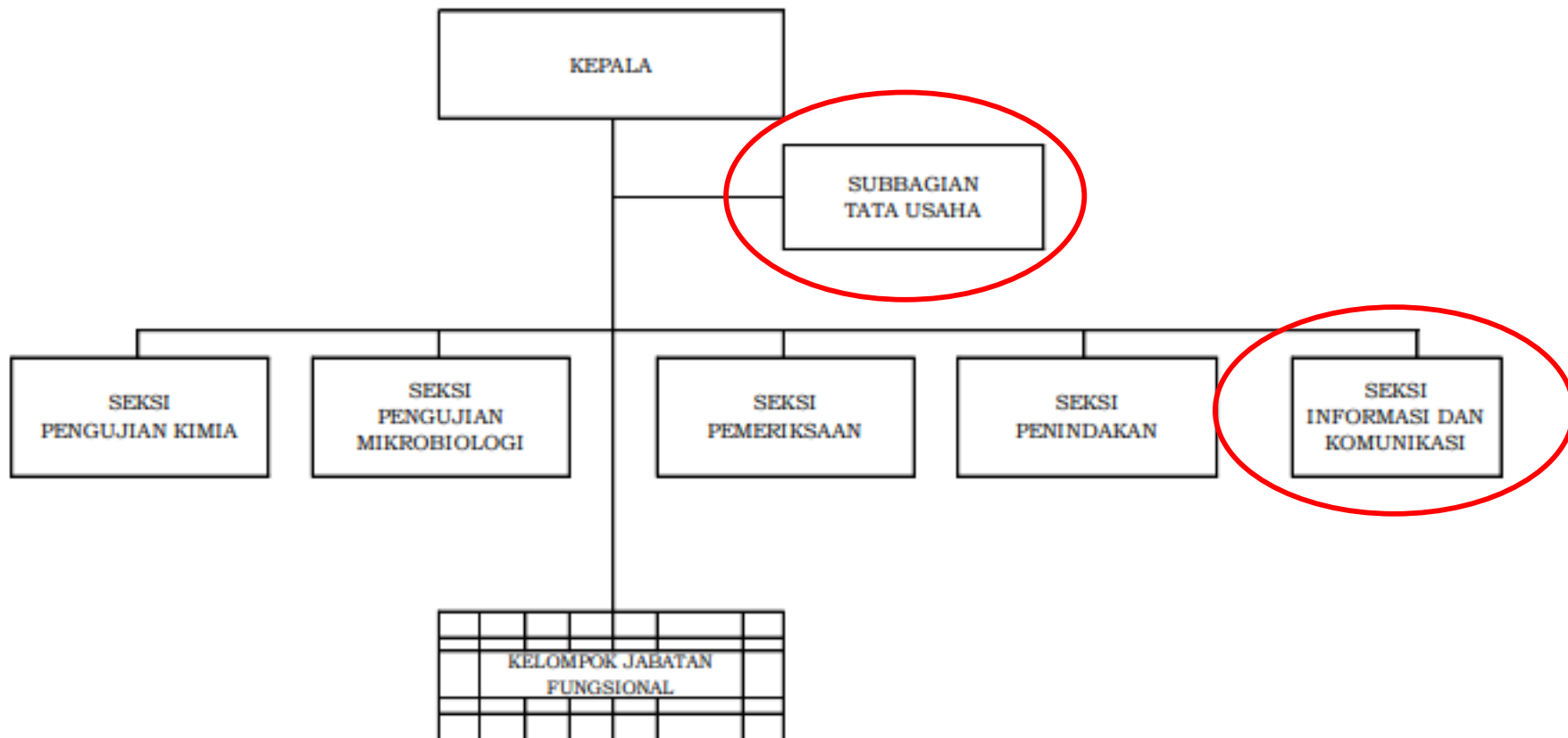
Keterangan : Pada tahun 2018, kegiatan terkait Pasar dan Desa aktivitas utama dilaksanakan oleh unit pusat (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, untuk tahun 2019 aktivitas utama dilaksanakan oleh 33 BB/BPOM

# BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

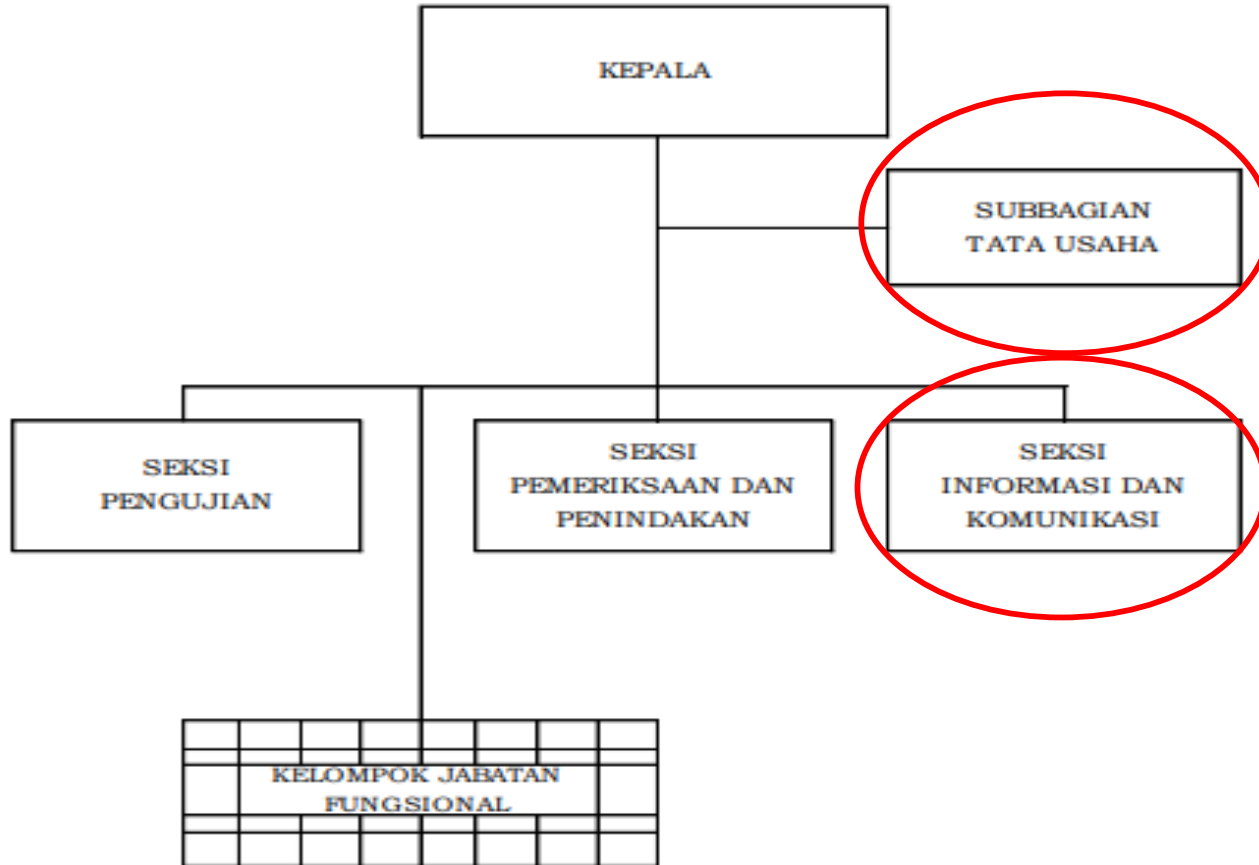


Peningkatan struktur Subbagian Tata Usaha menjadi Bagian Tata Usaha menunjukkan peningkatan peran manajemen dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Obat dan Makanan

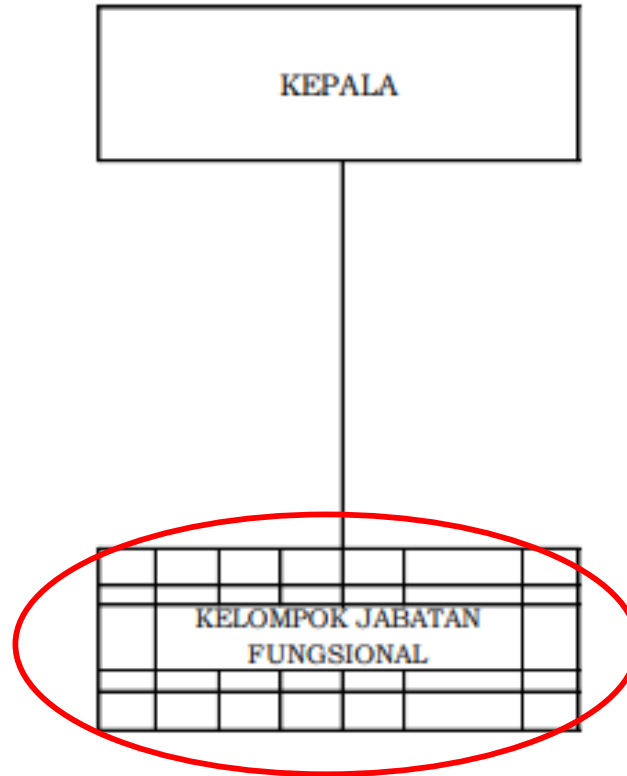
# BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE A



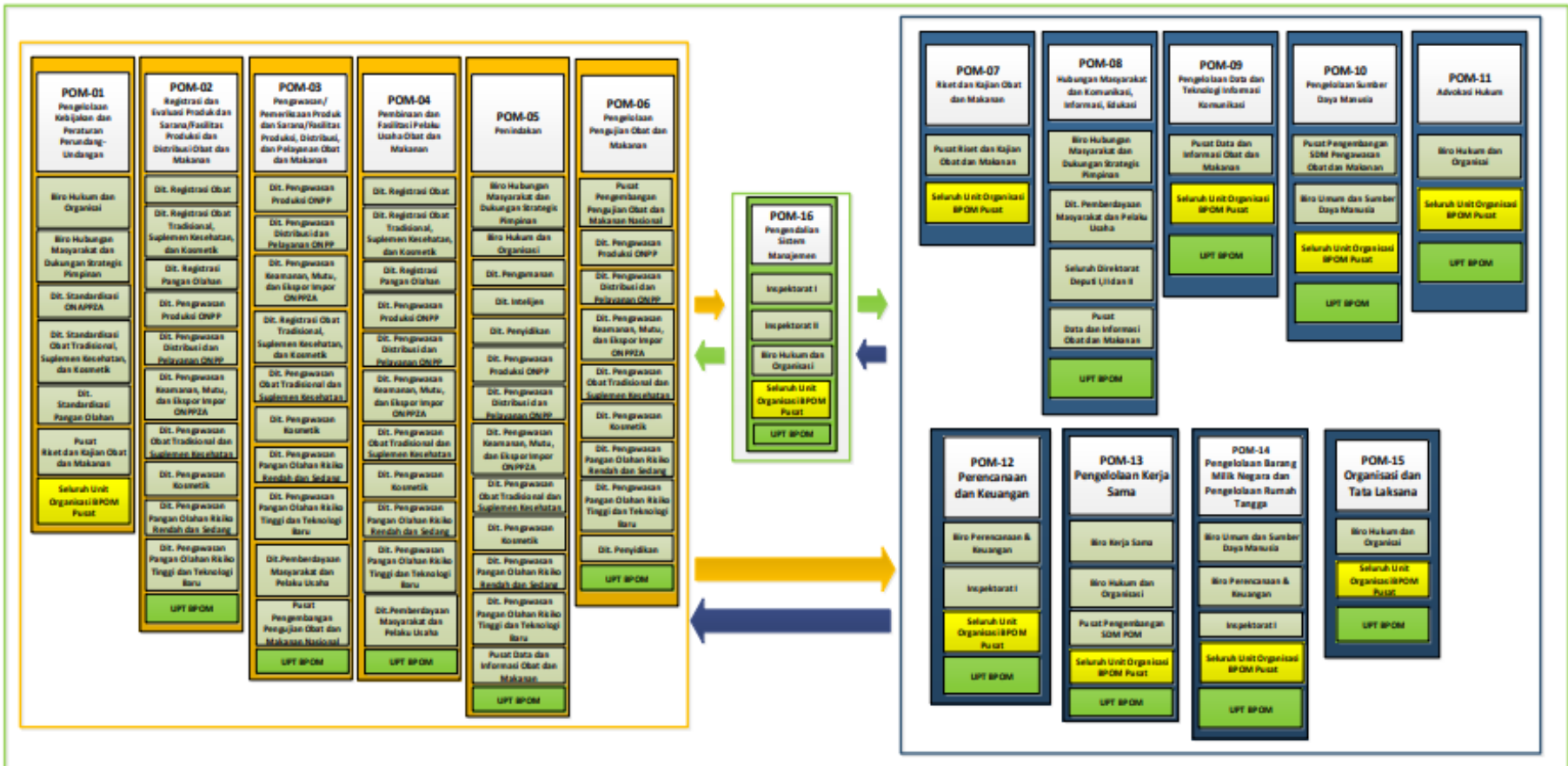
# BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE B



# BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



# PETA HUBUNGAN PROSES BISNIS

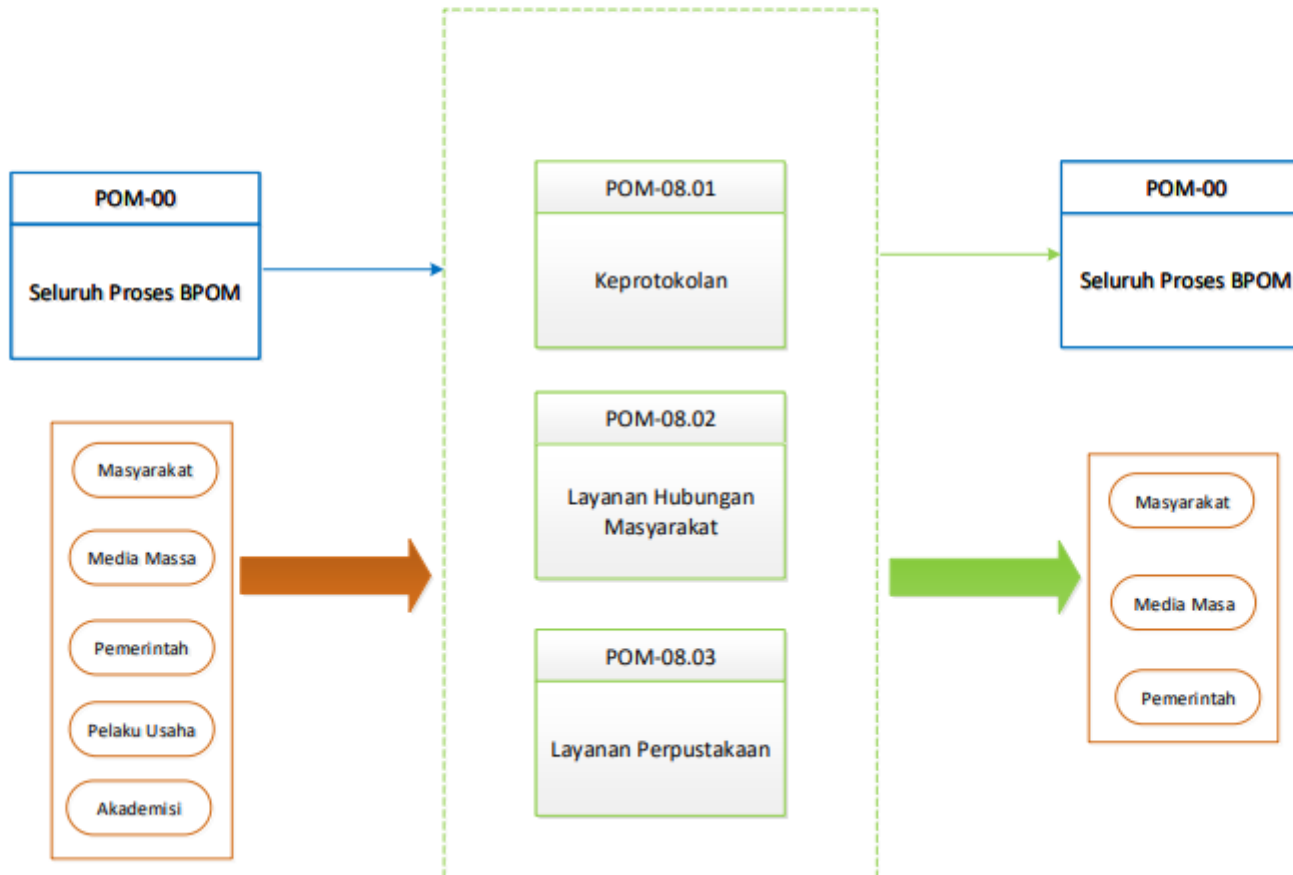


## PETA SUBPROSES POM-07 RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN



# PETA SUBPROSES

## POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

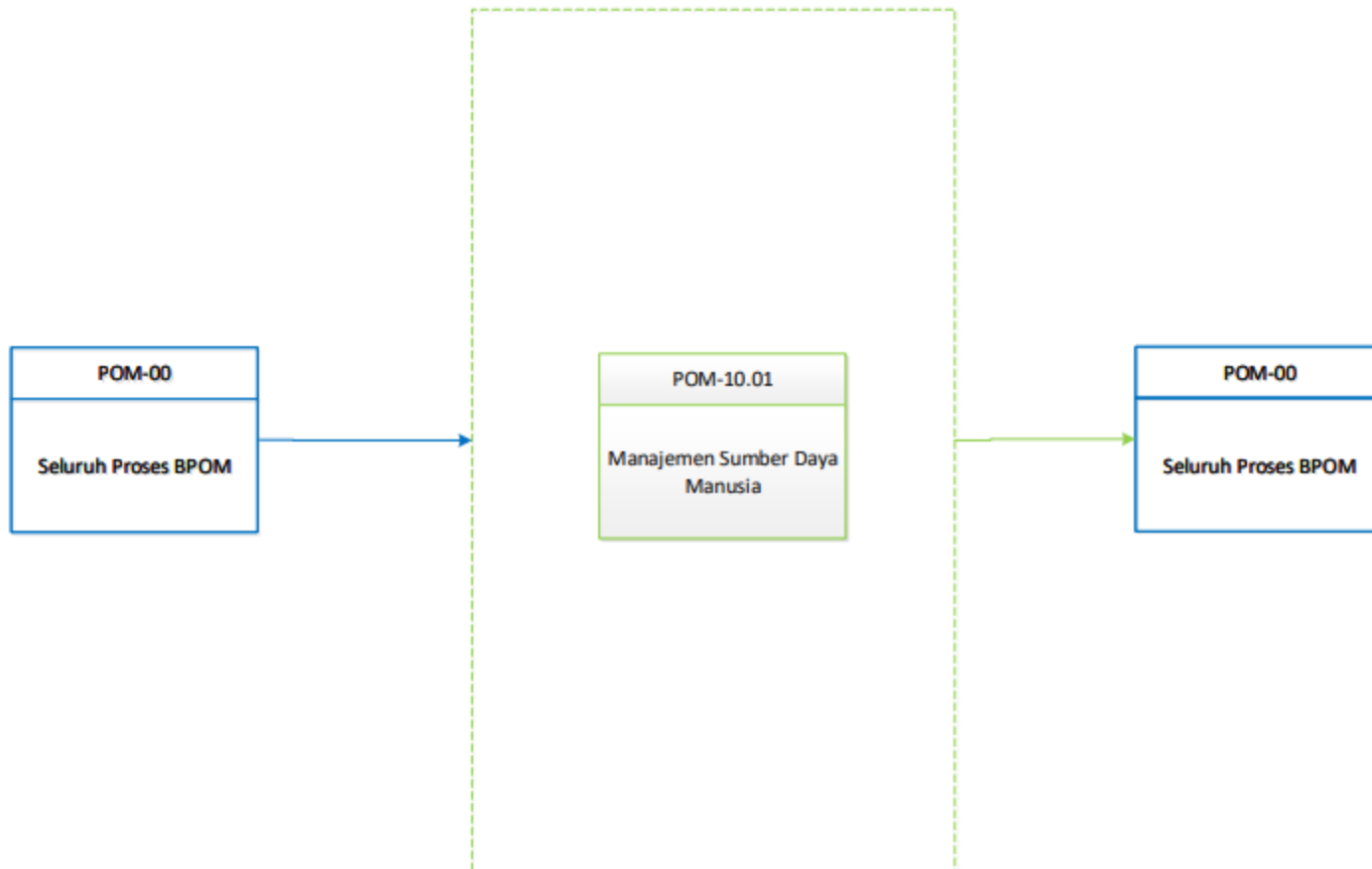




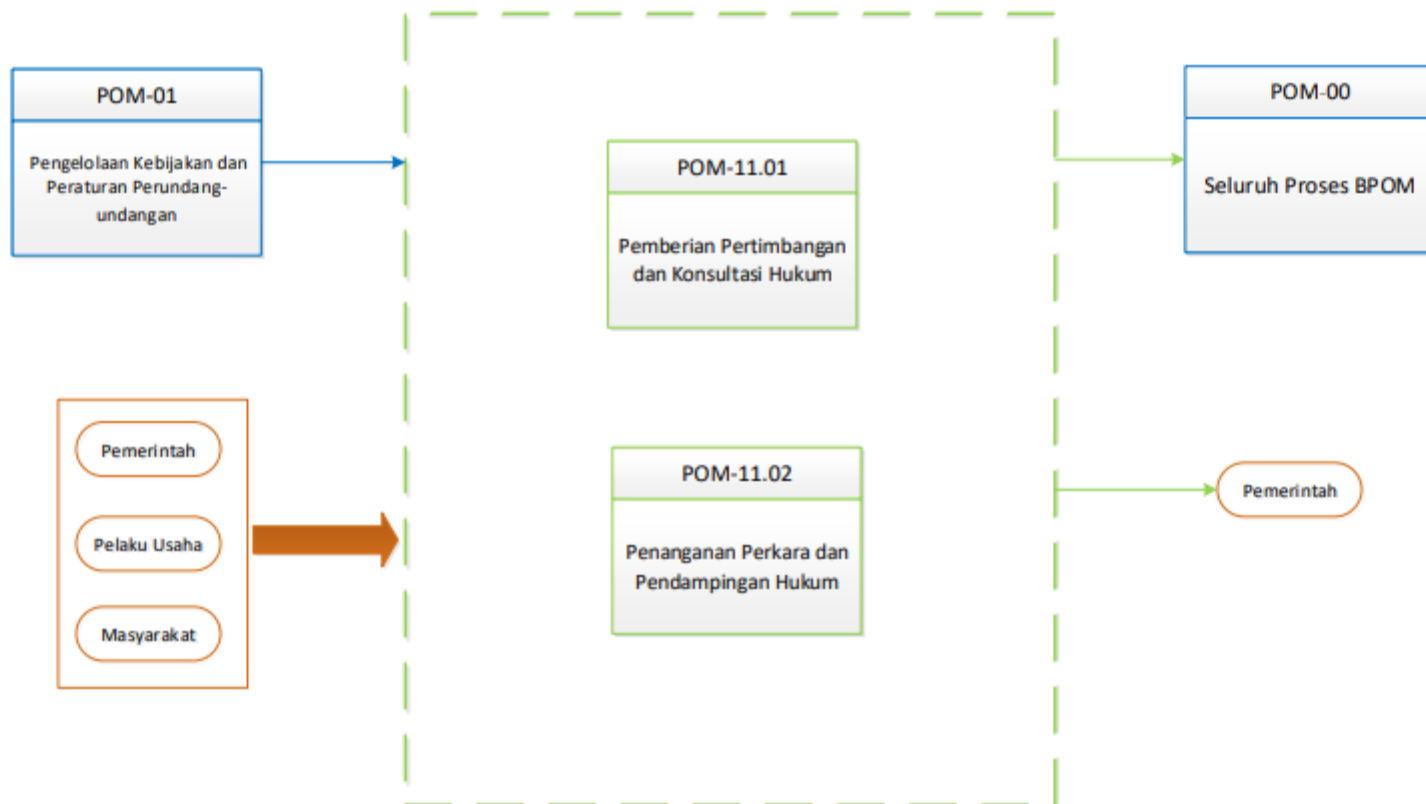
# PETA SUBPROSES POM-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI



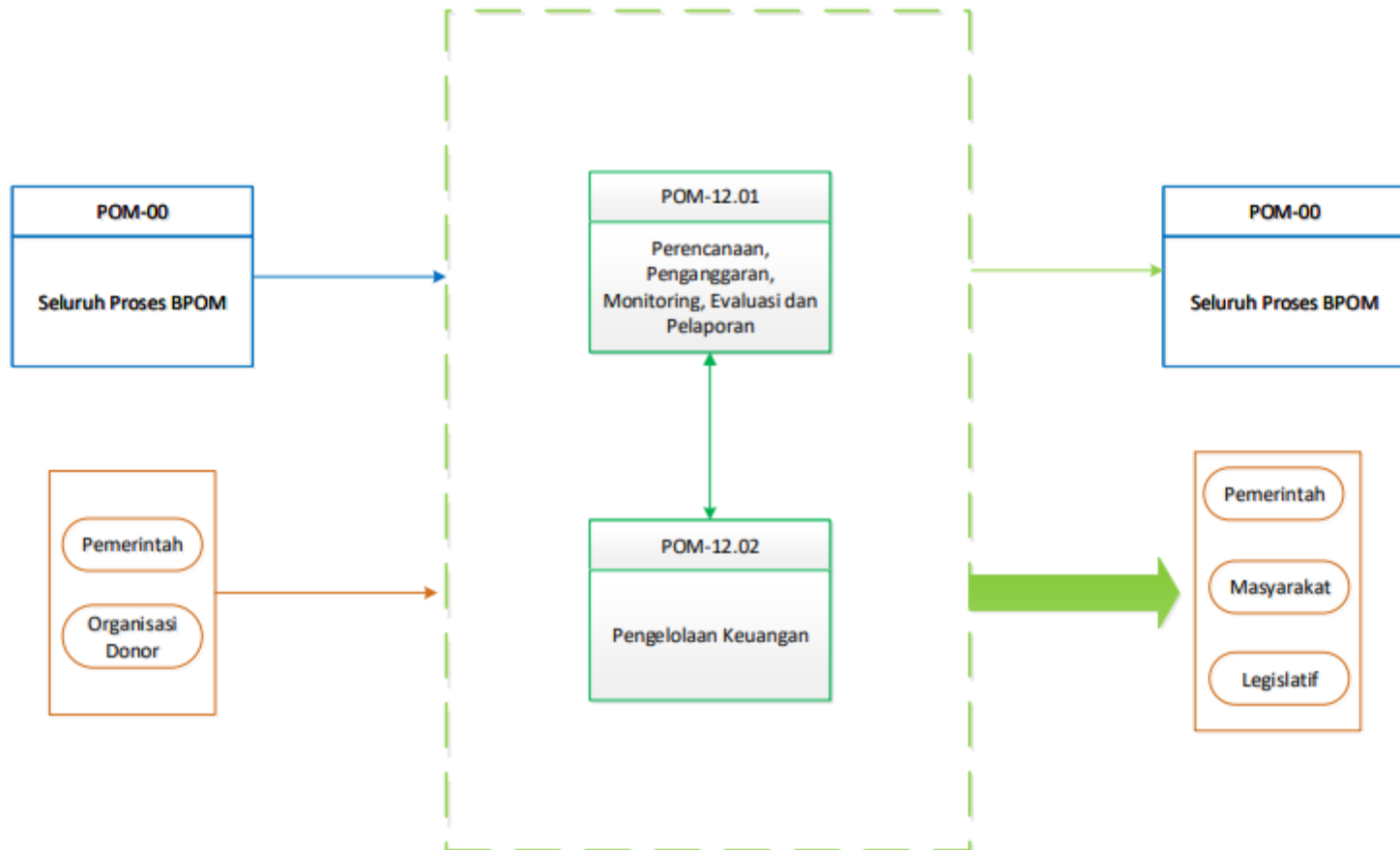
## PETA SUBPROSES POM-10 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA



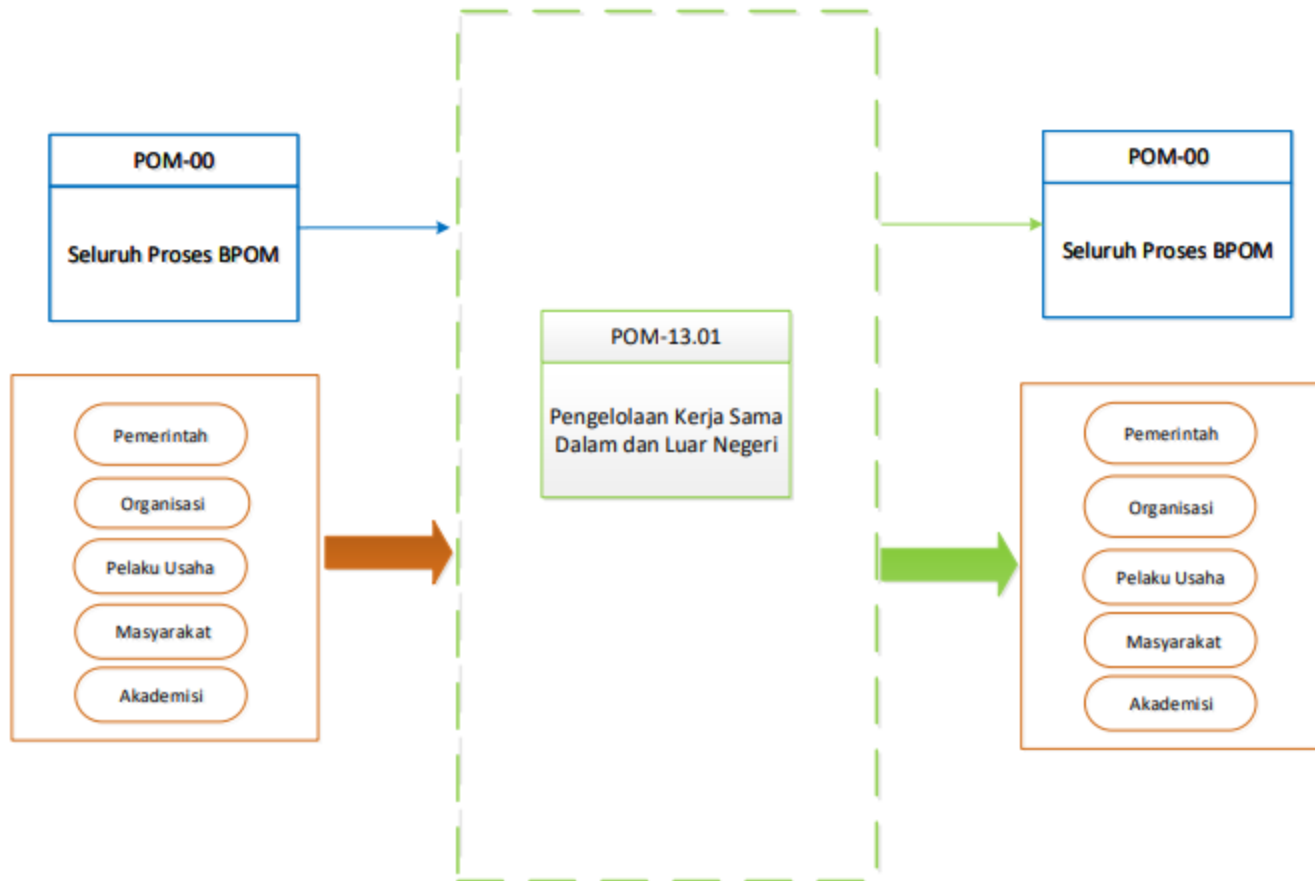
# PETA SUBPROSES POM-11 ADVOKASI HUKUM



## PETA SUBPROSES POM-12 PERENCANAAN DAN KEUANGAN

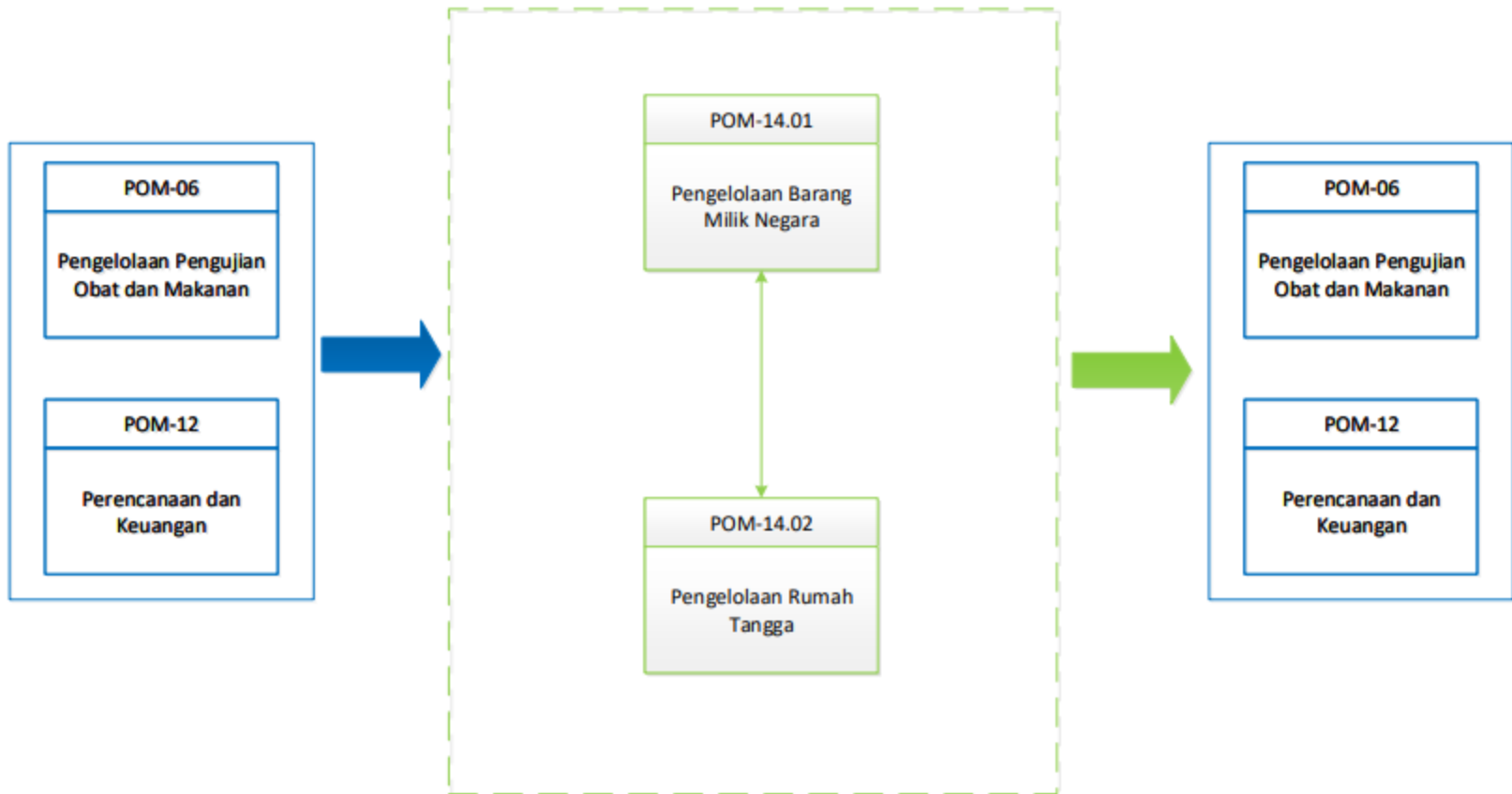


# PETA SUBPROSES POM-13 PENGELOLAAN KERJA SAMA

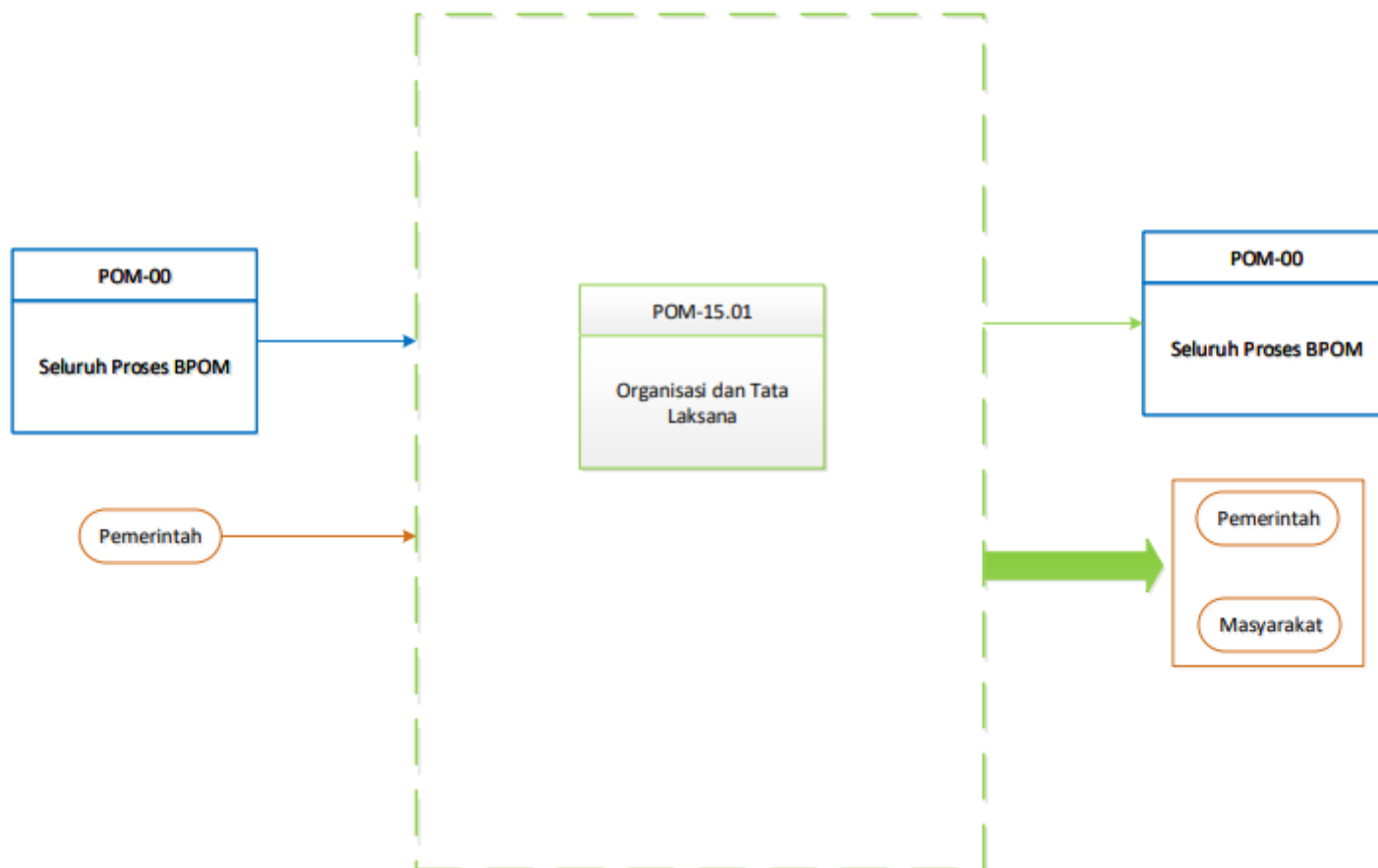


# PETA SUBPROSES

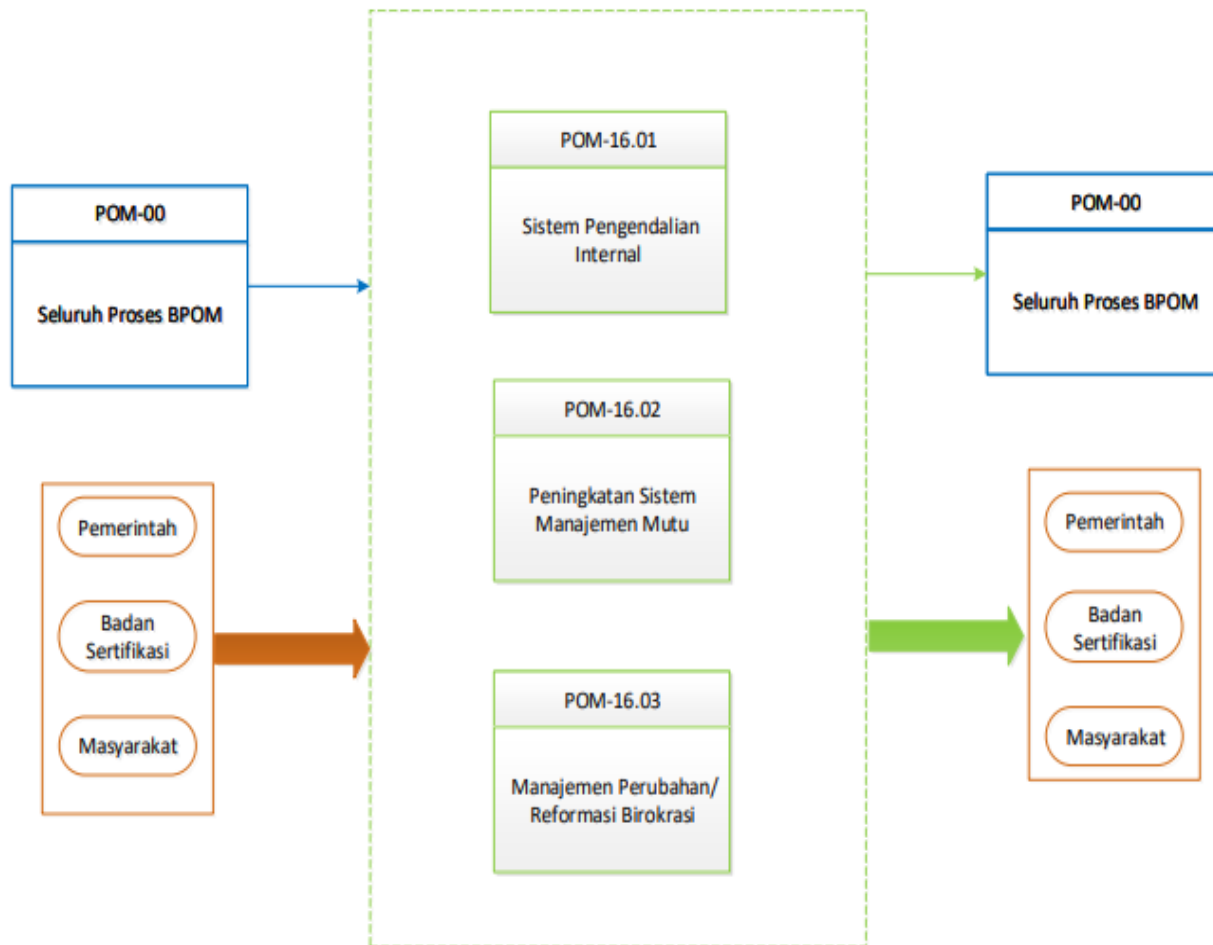
## POM-14 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA



## PETA SUBPROSES POM-15 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

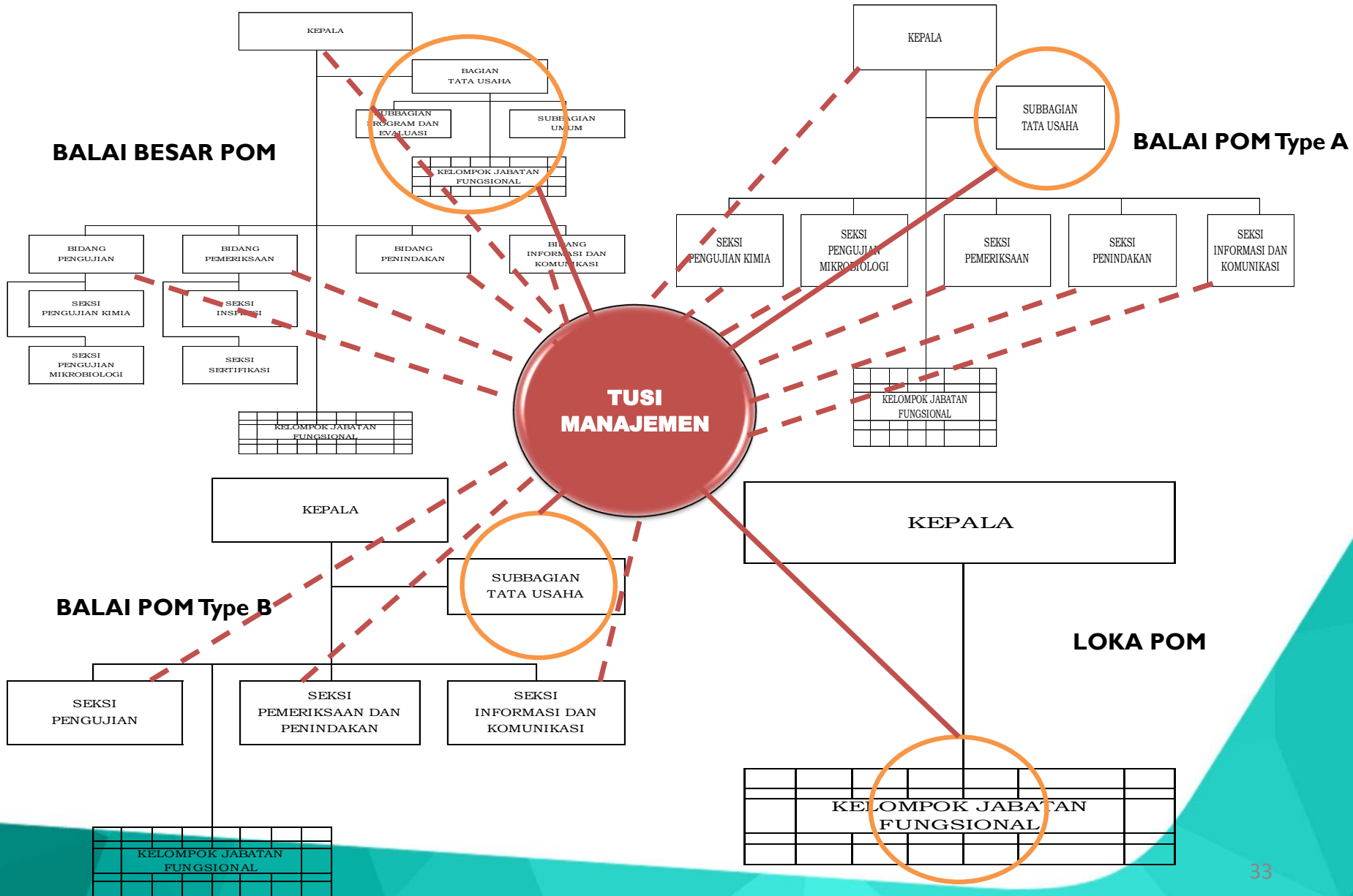


# PETA SUBPROSES POM-16 PENGENDALIAN SISTEM MANAJEMEN





# BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



# Uraian Tusi Bidang/Seksi KIE

TUGAS

- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Balai Besar POM

- Bidang Informasi dan Komunikasi
- Pasal 17, 18

Balai Tipe A

- Seksi Informasi dan Komunikasi
- Pasal 28

Balai Tipe B

- Seksi Informasi dan Komunikasi
- Pasal 33

Loka BPOM

- Jabatan Fungsional
- Pasal 36

FUNGSI

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

# Uraian Tusi Bidang/Seksi Manajemen



**3**

## **UKURAN KINERJA FUNGSI MANAJEMEN**

# Perhitungan Nilai SAKIP

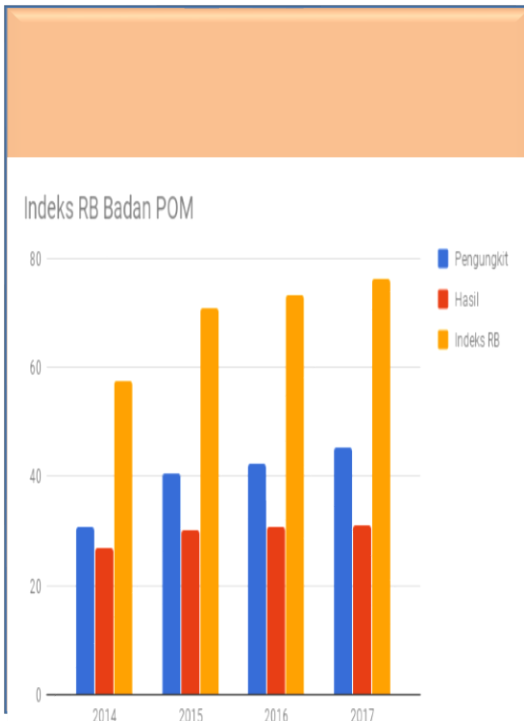
## KOMPONEN PENILAIAN

Komponen yang Dinilai		Bobot 2014	Bobot 2015 s.d. 2017
a.	Perencanaan Kinerja	35	30
b.	Pengukuran Kinerja	20	25
c.	Pelaporan Kinerja	15	15
d.	Evaluasi Internal	10	10
e.	Capaian Kinerja	20	20
	<b>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## KATEGORI DAN PREDIKAT NILAI SAKIP

Keterangan		
Kategori	Nilai	Predikat
<b>AA</b>	<b>&gt;90-100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>A</b>	<b>&gt;80-90</b>	<b>Memuaskan</b>
<b>BB</b>	<b>&gt;70-80</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>B</b>	<b>&gt;60-70</b>	<b>Baik</b>
<b>CC</b>	<b>&gt;50-60</b>	<b>Cukup</b>
<b>C</b>	<b>&gt;30-50</b>	<b>Agak Kurang</b>
<b>D</b>	<b>0-≤30</b>	<b>Sangat Kurang</b>

# Indeks Reformasi Birokrasi BPOM



No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,43	3,76	3,52	3,72
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	2,09	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	3,84	4,01
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,34	3,60	3,84	3,92
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,50	12,03	12,71	12,92
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,80	4,35	4,61
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,63	7,01	8,09	8,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,56	3,89	3,86	4,36
<b>Sub Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>30,64</b>	<b>40,64</b>	<b>42,30</b>	<b>45,20</b>

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2014	2015	2016	2017
<b>B</b>	<b>Hasil</b>					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,51	14,09	15,04	14,02
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,13	8,83	8,55	9,11
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,29	7,33	7,29	8,03
<b>Sub Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>26,93</b>	<b>30,25</b>	<b>30,89</b>	<b>31,16</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>100,00</b>	<b>57,57</b>	<b>70,89</b>	<b>73,19</b>	<b>76,36</b>

Mendukung arah kebijakan dan program Kepala Badan POM dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

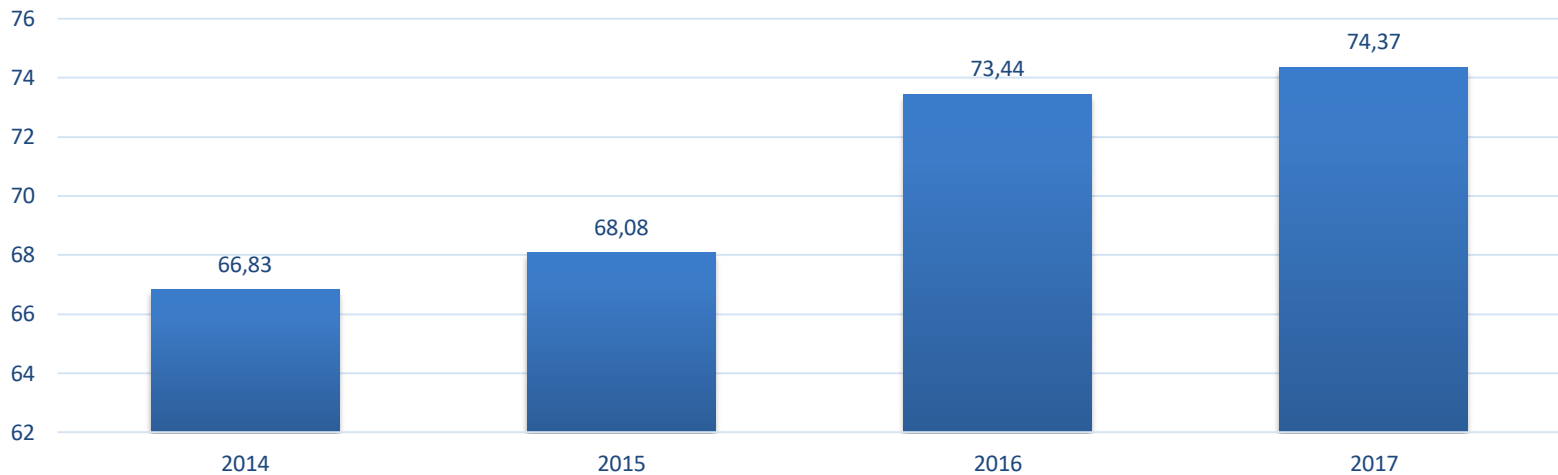
Tercapainya Sasaran Refomasi Birokrasi Nasional

Peningkatan kesejahteraan ASN BPOM melalui kenaikan Tunjangan Kinerja Menjadi 80%

**Pengawasan Inspektorat Utama Atas Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM**

# Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP



Komponen yang Dinilai		Bobot 2014	Bobot 2015 s.d. 2017	Nilai			
				2014	2015	2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	35	30	24.08	22.33	23.74	23.74
b.	Pengukuran Kinerja	20	25	13.74	14.61	16.41	16.99
c.	Pelaporan Kinerja	15	15	11.21	10.81	11.09	11.22
d.	Evaluasi Internal	10	10	5.54	6.99	7.49	7.52
e.	Capaian Kinerja	20	20	12.26	13.34	14.71	14.9
<b>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66.83</b>	<b>68.08</b>	<b>73.44</b>	<b>74.37</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>				<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

# Nilai Evaluasi LAKIP UPT BPOM

No	Balai/Balai Besar POM	Hasil Penilaian								
		2015			2016			2017		
		Nilai	Kategori	Predikat	Nilai	Kategori	Predikat	Nilai	Kategori	Predikat
1	Balai Besar POM di Surabaya	70.59	BB	Sangat Baik	73.01	BB	Sangat Baik	75.75	BB	Sangat Baik
2	Balai Besar POM di Bandung	67.12	B	Baik	68.94	B	Baik	73.66	BB	Sangat Baik
3	Balai POM di Palangkaraya	63.06	B	Baik	72.84	BB	Sangat Baik	73.48	BB	Sangat Baik
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	70.58	BB	Sangat Baik	73.60	BB	Sangat Baik	73.28	BB	Sangat Baik
5	Balai Besar POM di Medan	69.93	B	Baik	69.67	B	Baik	73.28	BB	Sangat Baik
6	Balai Besar POM di Denpasar	67.99	B	Baik	72.21	BB	Sangat Baik	73.14	BB	Sangat Baik
7	Balai POM di Pangkalpinang	62.54	B	Baik	72.38	BB	Sangat Baik	72.99	BB	Sangat Baik
8	Balai POM di Ambon	62.59	B	Baik	68.41	B	Baik	72.92	BB	Sangat Baik
9	Balai POM di Gorontalo	61.16	B	Baik	68.79	B	Baik	72.91	BB	Sangat Baik
10	Balai Besar POM di Bandar Lampung	59.71	CC	Cukup	68.52	B	Baik	72.89	BB	Sangat Baik
11	Balai Besar POM di Mataram	60.28	B	Baik	68.31	B	Baik	72.83	BB	Sangat Baik
12	Balai POM di Kendari	70.23	BB	Sangat Baik	71.14	BB	Sangat Baik	72.77	BB	Sangat Baik
13	Balai Besar POM di Pontianak	63.27	B	Baik	71.01	BB	Sangat Baik	72.75	BB	Sangat Baik
14	Balai Besar POM di Banjarmasin	67.34	B	Baik	71.23	BB	Sangat Baik	72.26	BB	Sangat Baik
15	Balai POM di Serang	55.50	CC	Cukup	68.77	B	Baik	72.18	BB	Sangat Baik
16	Balai Besar POM di Padang	69.73	B	Baik	71.67	BB	Sangat Baik	71.98	BB	Sangat Baik
17	Balai Besar POM di Jayapura	62.49	B	Baik	70.13	BB	Sangat Baik	71.97	BB	Sangat Baik
18	Balai Besar POM di Semarang	58.61	CC	Cukup	69.24	B	Baik	71.34	BB	Sangat Baik
19	Balai POM di Batam	61.76	B	Baik	68.86	B	Baik	70.98	BB	Sangat Baik
20	Balai Besar POM di Pekanbaru	61.26	B	Baik	68.03	B	Baik	70.98	BB	Sangat Baik
21	Balai POM di Bengkulu	64.85	B	Baik	71.09	BB	Sangat Baik	70.93	BB	Sangat Baik
22	Balai Besar POM di Palembang	62.46	B	Baik	69.20	B	Baik	70.62	BB	Sangat Baik
23	Balai POM di Manokwari	63.09	B	Baik	67.70	B	Baik	70.47	BB	Sangat Baik
24	Balai POM di Jambi	60.98	B	Baik	68.58	B	Baik	70.43	BB	Sangat Baik
25	Balai Besar POM di Manado	66.97	B	Baik	68.81	B	Baik	70.29	BB	Sangat Baik
26	Balai Besar POM di Makassar	57.20	CC	Cukup	69.41	B	Baik	70.27	BB	Sangat Baik
27	Balai Besar POM di Jakarta	69.45	B	Baik	67.71	B	Baik	70.11	BB	Sangat Baik
28	Balai POM di Palu	69.96	B	Baik	69.87	B	Baik	69.89	B	Baik
29	Balai Besar POM di Samarinda	67.34	B	Baik	69.34	B	Baik	69.11	B	Baik
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	68.18	B	Baik	69.10	B	Baik	67.66	B	Baik
31	Balai POM di Kupang	57.07	CC	Cukup	70.50	BB	Sangat Baik	62.97	B	Baik
32	Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-	-	57.09	CC	Cukup
	<b>Rata-rata</b>	<b>64.30</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>69.94</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>71.07</b>	<b>BB</b>	<b>Sangat Baik</b>



# PENINGKATAN STATUS POLDA DAN POLRES



## Menpan-RB Setujui Kenaikan Status Tiga Polda dan Lima Polres

**Popy Rakhmawaty**

Senin, 26 September 2016 - 16:40 WIB



Menpan-RB Asman Abnur tengah

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memberi persetujuan peningkatan status tiga Kepolisian Daerah (Polda) tipe B menjadi tipe A.

Selain itu, Asman juga menyetujui peningkatan status lima Kepolisian Resort (Polres), serta pembentukan delapan Polres baru. Tiga Polda yang disetujui naik statusnya dari tipe B menjadi tipe A adalah Polda Kepulauan Riau, Polda Riau dan Polda Lampung.

(AKBP). Persetujuan peningkatan status ketiga Polda tersebut, dituangkan dalam Surat Menteri PANRB No. B/3108/M.PANRB/9/2016 tentang Penguatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja POLRI, yang ditujukan kepada Kapolri.

Dalam surat itu, Menpan-RB Asman Abnur menyampaikan, kebutuhan pegawai dilakukan dengan memanfaatkan pegawai yang ada di Polri atau instansi pemerintah lain di luar Polri. "Pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara," kata Asman, di Jakarta, Senin (26/9/2016).

Diakuinya, peningkatan status ketiga Polda dan lima Polresta tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kinerja. "Satu tahun setelah penetapan akan dilakukan evaluasi," tandasnya.

Asman menyatakan, hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana implikasi peningkatan tipe B menjadi A terhadap peningkatan dan inovasi pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

# FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

### PETA SUBPROSES

### CROSS FUNGSIONAL MAPS (CFM)

#### SOP MAKRO:

1. POM-08.01 Keprotokolan
2. POM-08.02 Layanan Hubungan Masyarakat
3. POM-08.02 Layanan Perpustakaan

# TERIMA KASIH



  
**BADAN POM**

Hidup Sehat Dengan  
**“CekKLIK”**

- ☑ CEK KEMASAN
- ☑ CEK LABEL
- ☑ CEK IZIN EDAR
- ☑ CEK KEDALUARSA

  
**1500533  
HALOBPOM**

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) | Follow us  Bpom RI  @BPOM\_RI  BPOM RI

# PEDOMAN EVALUASI SAKIP BPOM BERDASARKAN PERMENPAN DAN RB NO. 12 TAHUN 2015

## A. Perencanaan Kinerja

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT KERJA ...					
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SATKER		KONTROL KERANGKA
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	Renstra SATKER telah disusun		Y/T	Belum diisi	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y/T	Belum diisi	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y/T	Belum diisi	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y/T	Belum diisi	OK
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A/B/C/D/E	Error	SALAH, RPJMD 2015-2019
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A/B/C/D/E	Error	SALAH, RPJMD 2015-2019
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A/B/C/D/E	Error	SALAH, RPJMD 2015-2019
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E	Error	SALAH, RPJMD 2015-2019
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A/B/C/D/E	Belum diisi	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A/B/C/D/E	Belum diisi	EVALUASI
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!

## A. Perencanaan Kinerja (lanjutan)

<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>****</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y/T	Belum diisi	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y/T	Belum diisi	✖
3	PK telah menyajikan IKU		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
4	PK telah dipublikasikan		Y/T	Belum diisi	✖
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>****</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A/B/C/D/E	Error	SALAH, PK IS.4.5.1.2.
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E	Error	SALAH, PK IS.4.5.1.2.
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y/T	Belum diisi	✖
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y/T	Belum diisi	✖
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y/T	Belum diisi	#DIV/0!
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!

## B. Pengukuran Kinerja

<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y/T	Belum diisi	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A/B/C/D/E	Belum diisi	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y/T	Belum diisi	✖
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A/B/C/D/E	Error	SALAH, IKU ISIA 44
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A/B/C/D/E	Error	SALAH, IKU ISIA 44
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y/T	Belum diisi	✖
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y/T	Belum diisi	✖
<b>III.</b>	<b>IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A/B/C	Belum diisi	#DIV/0!
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		A/B/C	Belum diisi	#DIV/0!
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
19	IKU telah <i>direvisi secara berkala</i>		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pendendalian dan pemantauan kinerja secara		A/B/C	Belum diisi	#DIV/0!

## C. Pelaporan Kinerja

C. PELAPORAN KINERJA (15%)		####	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y/T	Belum diisi	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y/T	Belum diisi	✖
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y/T	Belum diisi	✖
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
<b>II.</b>	<b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A/B/C/D	Belum diisi	#DIV/0!
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat		A/B/C/D/E	Belum diisi	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y/T	Belum diisi	✖
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	✖

## D. Evaluasi Internal

D. EVALUASI INTERNAL (10%)		###	#DIV/0!	#DIV/0!	
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		YIT	Belum diisi	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		YIT	Belum diisi	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah		A/B/C/D	Belum diisi	●●
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A/B/C/D/E	Belum diisi	###
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A/B/C/D/E	Belum diisi	●●
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A/B/C/D/E	Belum diisi	●●
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat		A/B/C/D/E	Belum diisi	●●
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A/B/C/D/E	Belum diisi	●●
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A/B/C/D/E	Belum diisi	●●
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		A/B/C/D	Belum diisi	●●
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan		A/B/C/D/E	Belum diisi	###
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		A/B/C/D/E	Belum diisi	###



## E. Pencapaian Sasaran/Kinerja

<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI</b>		<b>####</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)</b>		<b>7,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
1	Target dapat dicapai		A/B/C/D/E	Belum diisi	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A/B/C/D/E	Belum diisi	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E	Belum diisi	
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)</b>		<b>####</b>	<b>0,00%</b>		
4	Target dapat dicapai				
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya				
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan				
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	